

## **NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MAHASISWA DI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022**

Eden Shaumil<sup>1</sup>, Mohammad Mustari<sup>2</sup>, Sawaludin<sup>3</sup>, Lalu Sumardi<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>PPKn FKIP Universitas Mataram, <sup>3</sup>Dosen PPKn FKIP Universitas Mataram  
[edenshaumil@gmail.com](mailto:edenshaumil@gmail.com), [sawaludin@unram.ac.id](mailto:sawaludin@unram.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine democratic values in the student presidential election at Mataram University in 2022. This research uses a qualitative research approach with a descriptive type of research. The data collection techniques used are interview and documentation techniques. The results of this study show that the value of democracy in the 2022 student presidential election at Mataram University is the value of freedom of opinion, freedom of association, freedom of participation, equality between citizens / tolerance, gender equality, people's sovereignty, trust, and the value of cooperation. In addition, there are supporting and inhibiting factors in the exposure of democratic values in the student presidential election at Mataram University in 2022. The supporting factor is the organizers who provide space for students to participate so that they automatically provide space for the creation of democratic values. While the inhibiting factor is that many problems are deliberately created and motivated by provocations and conflict engineering that cause various chaos. The problems and turmoil that occurred caused many violations of democratic values. Such as encouragement or coercion, violations of religious tolerance, conflict engineering, and finally the committee that is not neutral.*

*Keywords: Democratic Values, Student Presidential Election, University of Mataram*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan presiden mahasiswa di universitas mataram tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di universitas mataram tahun 2022 yaitu nilai kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga/ Toleransi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya, dan nilai kerja sama. Selain itu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam diterapkannya nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022. Faktor pendukungnya yaitu pihak penyelenggara yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berpartisipasi sehingga otomatis memberikan ruang terciptanya nilai demokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya banyaknya masalah yang sengaja diciptakan dan dilatarbelakangi oleh adanya provokasi dan rekayasa konflik yang menimbulkan berbagai keributan. Permasalahan dan keributan yang terjadi ini menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap nilai demokrasi. seperti adanya dorongan atau

paksaan, pelanggaran terhadap toleransi beragama, rekayasa konflik, dan yang terakhir panitia yang tidak netral.

Kata kunci: *Nilai Demokrasi, Pemilihan Presiden Mahasiswa, Universitas Mataram*

### **A. Pendahuluan**

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa "*democracy is goverment of the people, by the people, and for people*" yang artinya "demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" (Bakhri et al, 2018). Demokrasi merupakan sistem yang memberikan kebebasan terhadap rakyatnya secara sah untuk ikut berartispasi dalam jalannya sebuah negara. Negara juga mempunyai wewenang atau kekuasaan yang mutlak dalam memberikan tujuan dari kehidupan didalamnya. Wilayah, masyarakat, dan administrasi adalah tiga prasyarat mendasar untuk pembentukan negara (Tarigan, 2019).

Selain berkembangnya demokrasi di masyarakat umum, demokrasi juga tumbuh dengan baik di kalangan remaja atau mahasiswa, dimana mahasiswa ikut berpartisipasi terhadap jalannya demokrasi, Mahasiswa selalu memberikan sumbangsi yang baik terhadap rakyat, karena mahasiswa biasanya lebih

peka terhadap sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat,.

Pergerakan yang dilakukan Mahasiswa dalam mengkritisi ataupun melakukan demonstrasi disatukan dan diwadahi oleh organisasi salah satunya dikenal sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat BEM. BEM merupakan organisasi Mahasiswa yang setara lembaga eksekutif pada tingkat universitas. Menurut Abadi (2021) dalam fungsinya BEM berperan sebagai penyalur aspirasi Mahasiswa dan membantu menyelesaikan permasalahan mahasiswa yang terjadi

BEM selalu berusaha menyampaikan aspirasi rakyat maupun mahasiswa dan juga membantu menyelesaikan masalah yang ada baik dilingkungan kampus maupun diluar kampus. Selain itu BEM memiliki banyak program kerja salah satunya adalah Pemilihan Umum Raya (Pemira). Pemira merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil presiden Mahasiswa.

Pemilihan Umum Raya atau yang disingkat Pemira merupakan suatu mekanisme demokrasi kampus yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dan diselenggarakan secara langsung, universal, leluasa, rahasia, jujur, serta adil di setiap kampus atau perguruan tinggi (Negara, 2018). Pemira yang dilakukan setiap satu kali dalam setahun ini diselenggarakan guna mewedahi Mahasiswa untuk menyalurkan hak mereka dalam memilih Presiden Mahasiswa.

Presiden mahasiswa merupakan mahasiswa yang dipilih dan diberi amanah untuk memimpin dan menjadi ketua dari BEM. Presiden mahasiswa juga merupakan bagian terpenting bagi pergerakan BEM dan alur mahasiswa lainnya. Presiden mahasiswa dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa itu sendiri secara demokratis sama seperti yang dilakukan ketika memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebagainya. Dari sini dapat dilihat bahwa salah satu penerapan nyata adanya demokrasi lingkungan kampus yaitu diselenggarakannya Pemira untuk melakukan pemilihan Presiden Mahasiswa.

Salah satu perguruan tinggi yang rutin menyelenggarakan Pemira

adalah Universitas Mataram. Setiap tahunnya Universitas Mataram yang dibantu oleh BEM Universitas Mataram melakukan pemilihan ketua dan wakil dari presiden Mahasiswa, hal ini dilakukan untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang akan menjalankan kepengurusan di Universitas Mataram sealam satu tahun kepengurusan. Dalam pelaksanaanya Pemira Universitas Mataram memiliki penyelenggara khusus yaitu Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Mataram atau KPRM Unram.

Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Mataram (KPRM Unram) merupakan panitia penyelenggara Pemilihan Umum Raya yang ada di Universitas Mataram, dimana KPRM Unram mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Umum Raya pada universitas mataram, mulai dari awal sosialisasi kegiatan Pemira kepada Mahasiswa sampai dengan akhir Perhitungan suara. Pada setiap tahunnya Pemira selalu mengundang partisipasi tinggi dari mahasiswa. Adanya kampanye oleh para kandidat calon presiden Mahasiswa menjadikan Pemira di

Universitas Mataram menjadi lebih berwarna, karena setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa yang mencalonkan diri pada kontes Pemira membawa visi dan misi yang berbeda-beda.

Pemilihan presiden mahasiswa juga tidak lepas oleh adanya masalah atau konflik yang terjadi pada pelaksanaannya, contohnya pada Pemira Universitas Mataram tahun 2022 pemilihan ketua BEM Atau presiden Mahasiswa di universitas mataram berjalan kurang baik dan juga ricuh, dimana pada saat pemilihan presiden mahasiswa terjadi beberapa kali perkelahian antar pendukung Pasangan Calon Presiden Mahasiswa hingga menimbulkan korban. Dari awal proses pemilihan hingga perhitungan suara tetap saja adanya kericuhan, hal ini tentunya bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang ada, dari sinilah penelitian ini dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat diterapkannya nilai demokrasi pada

pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitaian ini adalah jenis deskriptif, Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.(Gifari et al., 2019). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena membantu peneliti dalam mengkaji dan mendeskripsikan suatu peristiwa atau fakta-fakta mengenai nilai-nilai demokrasi pada pemilihan presiden Mahasiswa di Universitas Mataram.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi-terstruktur yang dilakukan pada Mahasiswa aktif universitas mataram yang mengikuti kegiatan Pemira tahun 2022, dan Pihak KPRM Unram tahun 2022. Dokumentasi yang dibutuhkan dari penelitian ini adalah foto, link video, serta arsip dan dokumen yang

berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa Universitas Mataram tahun 2022.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Universitas Mataram dengan teknik wawancara dan dokumentasi data sebagai berikut.

#### **1. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Presiden Mahasiswa Di Universitas Mataram Tahun 2022**

Pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 terdapat delapan nilai-nilai demokrasi, diantaranya sebagai berikut.

##### **a) Kebebasan Berpendapat**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 ruang yang diberikan sangat terbuka dimana mahasiswa bebas berpendapat disetiap kegiatan yang ada di Pemira Unram. Hal ini terlihat mulai dari bertanya pada saat sesi debat, saling membantu gagasan sesama tim pendukung, mengkritik aturan dan prosedur mengenai pemira, kemudian pada awal tehknikal meeting,

pendaftaran, pemilihan, hingga pengumuman hasil dari Pemira, mahasiswa diberikan kebebasan kepada untuk berpendapat, namun hal tersebut juga mempunyai batasan berupa aturan dalam menyampaikan pendapat, yaitu berupa waktu yang diberikan untuk berpendapat, dan juga substansi dari pendapat yang disampaikan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alwan (2021), dimana pada pemilihan ketua umum Himnas PPKn 2018 pada saat berjalannya kongres peserta sebagai anggota dalam forum diberikan kebebasan dalam memberikan opini maupun argument. Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dengan sebuah sistem politik demokrasi (Dahl, 2013).

##### **b) Kebebasan Berkelompok**

Pada penelitian penelitian yang telah dilakukan nilai kebebasan berkelompok pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 diaktualisasikan dengan baik dan tidak ada larangan. Bukti nyatanya yaitu adanya OKP luar kampus, ada organnisasi ikatan mahasiswa daerah, kemudian ada kelompok-kelompok yang menjadi

bagian dari pendukung ketiga pasangan calon, dan ini merupakan bentuk mahasiswa bebas dalam berkelempok pada pemilihan presiden mahasiswa dan tidak ada larangan untuk berkelompok baik itu larangan dari pihak birokrasi kampus atau bahkan dari pihak panitia penyelenggara.

Hasil penelitian diatas juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulawi (2019) di SMK Darus Syifa Kota Cilegon mempunyai hasil yang sama mengenai kebebasan berkelompok, nilai tersebut sangat terlihat yaitu siswa diberikan kebebasan untuk memilih berkelompok dengan organisasi manapun. Sukarno (2013) menyatakan kebebasan berkelompok dalam suatu masyarakat untuk membentuk organisasi merupakan dasar nilai demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara.

### **c) Kebebasan Berpartisipasi**

Pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022, nilai kebebasan berpartisipasi sangat bebas dan terbuka, tidak ada larangan untuk berpartisipasi. Selain itu mahasiswa juga bebas untuk mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden dan

wakil persiden, kemudian mahasiswa juga bebas memberikan haknya untuk memilih dan bebas berpartisipasi mendukung pasangan calon.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Zahra (2023) juga memberikan hasil yang sama yaitu mengenai kebebasan untuk berpartisipasi, penelitian yang dilakukan di SMA Negeri Ngoro mendapatkan hasil bahwa kebebasan berpartisipasi tumbuh pada saat dilakukannya musyawarah, dimana para siswa berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya. Sedangkan syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa di Universitas Mataram yaitu harus mengumpulkan KTM yang telah ditentukan jumlahnya oleh KPRM, minimal ada rekomendasi dari 3 UKM/Ormawa universitas mataram, dan yang terakhir berupa berkas kesehatan dan juga IPK. Kemudian syarat sebagai pemilih atau untuk memilih yaitu hanya berupa mahasiswa aktif universitas mataram dan menunjukan KTM/KRS.

### **d) Toleransi**

Nilai toleransi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 tidak dikategorikan sempurna. Pada kenyataanya banyak pelanggaran

yang terjadi terkait dengan nilai toleransi disana, seperti pada saat pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mahasiswa universitas mataram saat itu adanya ucapan diskriminatif yang berbau agama yang menimbulkan kericuhan, dimana pada saat situasi mahasiswa sedang tegang ada ucapan provokatif yang mengandung diskriminasi terhadap mahasiswa lain, yaitu ucapan menyebut nama tuhan terhadap mahasiswa agama lain yang menimbulkan kemarahan dari mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu adanya larangan untuk beribadah dan ini sangat melanggar nilai toleransi, dimana pada saat panitia penyelenggara ingin melakukan jeda sholat pada saat pemilihan berlangsung justru dilarang oleh oknum yang mendesak para panitia penyelenggara untuk tidak sholat dan tetap melanjutkan pemilihan dan ini justru melanggar nilai toleransi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alwan (2021) mengenai pemilihan ketua umum Himnas PPKn 2018 mempunyai hasil penelitian yang sama mengenai toleransi, dimana pada saat kegiatan berlangsung adanya pengakuan dan toleransi

terhadap perbedaan keragaman suku, agama, ras, golongan atau dengan yang lainnya, karena pada kegiatan Kongres tersebut beragam mahasiswa yang menjadi peserta berasal dari daerah yang berbeda.

Toleransi pada dasarnya memberikan pengertian membiarkan, membebaskan, tidak mengambil peduli terhadap apa saja yang berada di luar dirinya (Agus Firmansyah dkk., 2023).

#### **e) Kesetaraan Gender**

Nilai kesetaraan *gender* pada pemilihan presiden mahasiswa di universitas mataram tahun 2022 diterapkan dengan baik terlihat adanya perempuan yang mencalonkan diri pada kontestasi Pemira Unram 2022 dan diberikan tempat setara dengan laki-laki, selain itu banyak juga perempuan yang diberikan kesempatan untuk ikut menjadi bagian dalam kepanitiaan ataupun sebagai pemegang tanggung jawab pada tim suksesnya dan bisa dilihat bahwa kenyataannya justru mahasiswa memilih berdasarkan visi, misi dan juga gagasan yang dibawakan oleh masing-masing calon presiden mahasiswa bukan berdasarkan jenis kelamin. Penelitian yang dilakukan oleh Amin (2014)

menunjukkan bahwa organisasi Muhammadiyah Kabupaten Bone memberikan perempuan dan laki-laki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi dan politik, artinya tidak ada perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi karena hak perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “segala waga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya disini negara menganggap laki-laki dan perempuan setara tanpa adanya pengecualian.

#### **f) Kedaulatan Rakyat**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di universitas mataram bahwa nilai kedaulatan rakyat justru dilanggar, terlihat banyak mahasiswa yang melanggar aturan dengan membuat kericuhan, melakukan pencoblosan dua kali, dan juga tidak menerima secara sah keputusan yang telah diumumkan, hal ini tentu bertentangan dengan kedaulatan rakyat, yang seharusnya mahasiswa berdaulat atas diri mereka masing-masing dalam memilih dan

menaati prosedur yang telah ada, sehingga pemimpin yang terpilih berdasarkan dari pilihan rakyat secara sah tanpa adanya pemberontakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryawati (2018) menunjukkan bahwa nilai kedaulatan rakyat dalam kontistusi memberikan kebebasan terhadap rakyat dalam penentuan pemimpin. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Sukarno (2013) yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah rakyat berkuasa dalam menentukan pemerintahan. Pemerintahan dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

#### **g) Rasa Percaya**

Pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 mahasiswa memberikan rasa percaya secara penuh terhadap pasangan calon yang didukung, akan tetapi tidak selalu menyeluruh dapat percaya terhadap apa yang ada, justru rasa curiga juga harus ada sebagai antisipasi adanya kecurangan.

Beberapa kecurigaan terjadi dikalangan mahasiswa terhadap panitia pada saat kegiatan Pemira, kecurigaan dari mahasiswa tertuju pada para pihak penyelenggara dimana awalnya ketua KPRM sebagai



pihak penyelenggara diganti sebanyak tiga kali yang menimbulkan kecurigaan dari mahasiswa. Kemudian kecurigaan juga muncul terhadap beberapa mahasiswa yang menjadi panitia KPRM yang dimana mahasiswa yang menjadi bagian dari panitia KPRM itu merupakan anggota-anggota dari organisasi-organisasi pengusung pasangan calon presiden mahasiswa, dan diyakini sengaja ditempatkan menjadi panitia KPRM untuk kepentingan tertentu.

Hasil penelitian diatas juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2019) dimana pada penelitian ini masyarakat kurang percaya terhadap para panitia dan pengawas pemilu di Kecamatan Pahandut.

#### **h) Kerjasama**

Pada pemilihan presiden mahasiswa Universitas Mataram tahun 2022 nilai kerjasama tumbuh dengan baik dikalangan mahasiswa, birokrasi kampus, dan pihak luar kampus yang berperan membantu. Menurut Masnur Ali & Raharja (2020) Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan antar sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama, dengan kerjasama seseorang akan lebih mudah untuk menyelesaikan

sesuatu pekerjaan. Pada pemilihan presiden mahasiswa tahun 2022 hal tersebut terlihat ketika mahasiswa saling membantu sesama tim pendukungnya berupa berkerjasama dalam memenangkan pasangan calonnya, mengkampanyekan dan kemudian membantu memberikan gagasan. Birokrasi kampus juga membantu dalam memfasilitasi tempat untuk berkegiatan dan memberikan pengamanan melalui Satpam dan Menwa selama kegiatan berlangsung. Selain itu ada juga pihak lain yang juga bekerjasama dalam membantu dalam kegiatan pemilihan presiden mahasiswa universitas mataram tahun 2022, yaitu organisasi kepemudaan (OKP), pihak Kepolisian, TNI, dan KPU. Organisasi kepemudaan (OKP) luar kampus berperan membantu memberikan dukungan, support, uang, dan ruangan tempat untuk bertukar pikiran. Selanjutnya pihak Kepolisian, TNI, Satpam, dan Menwa juga membantu mengamankan selama kegiatan berlangsung dan membantu mengamankan pada saat adanya keributan yang terjadi, dan yang terakhir pihak KPU yang juga ikut membantu dalam meminjamkan kotak suara dan memberikan edukasi

mengenai prosedur pemilihan dan juga cara melipat kertas suara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas beberapa nilai demokrasi tumbuh dengan baik pada pemilihan persiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 yaitu nilai kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, kesetaraan Gender dan nilai kerja sama. Sedangkan nilai Toleransi, kedaulatan rakyat, dan nilai rasa percaya tidak terimplementasi dengan baik.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Diterapkannya Nilai-Nilai Demokrasi Pada Pemilihan Presiden Mahasiswa Di Universitas Mataram Tahun 2022**

Pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022, terdapat faktor pendukung dan penghambat diterapkannya nilai-nilai demokrasi, diantaranya sebagai berikut.

### **a) Faktor Pendukung**

Pihak penyelenggara menjadi faktor pendukung dalam diterapkannya nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022. Pihak penyelenggara dalam hal ini memerankan pemerintah pada wilayah kampus dalam memberikan wadah kepada mahasiswa untuk

berpartisipasi dan menyalurkan haknya, Hal ini terlihat dari awal panitia memberikan informasi terkait dengan waktu akan dilaksanakannya kegiatan Pemira, melakukan sosialisasi mengenai tahap-tahap kegiatan Pemira, memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melakukan kampanye, kemudian panitia memundurkan waktu kegiatan agar mahasiswa yang libur dan sedang KKN dapat ikut berpartisipasi pada kegiatan Pemira Universitas Mataram tahun 2022. Hal ini mendorong mahasiswa berpartisipasi pada kegiatan Pemira dan mendorong terciptanya nilai demokrasi pada Pemira Universitas Mataram tahun 2022.

Nilai kerjasama juga tumbuh dari para panitia penyelenggara pemira di Universitas Negeri Padang, mereka sama-sama bekerja untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan, dan dilakukan berdasarkan strateginya masing-masing.

### **b) Faktor Penghambat**

#### **(1) Paksaan**

Pada saat pemilihan berlangsung ada beberapa paksaan dan dorongan terhadap mahasiswa untuk memilih, dimana mereka

mengambil dan mengumpulkan KTM mahasiswa agar mahasiswa mencoblos, hal ini tentu melanggar dan merusak nilai demokrasi. Menurut Nugrahaeni (2015) dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Selain itu, pihak penyelenggara juga mendapat perlakuan yang sama dimana beberapa oknum memaksa para panitia untuk tidak netral dan mengajak untuk berpihak. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 2 Rancangan Peraturan Mahasiswa Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Raya, yang berbunyi "Pemira Mahasiswa Unram dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

#### (2) Pelanggaran toleransi beragama

Pada saat prosesi pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Mataram yang berlokasi di UPT Perpustakaan, terjadi keriuhan yang disebabkan oleh adanya ucapan yang menyinggung terhadap agama lain dari mahasiswa. Selain ucapan yang menyinggung tersebut, terdapat kasus lain yang juga berkaitan dengan toleransi yang dialami oleh para panitia

penyelenggara Pemira. Pada saat pemilihan berlangsung pihak penyelenggara ingin melakukan ibadah Sholat dihalang oleh para oknum mahasiswa, mereka mendesak para panitia untuk tidak melakukan jeda sholat dan tetap melanjutkan melayani mahasiswa untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan dan ini tentu melanggar nilai toleransi dalam beragama.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anggraeni (2018), yang menyatakan toleransi merupakan suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Artinya mahasiswa tidak dibenarkan dalam menyinggung ataupun mengambil kebebasan orang lain dalam hal agama, dan ini tentu mencedraikan nilai demokrasi yang ada pada saat Pemira.

#### (3) Rekayasa Konflik

Pada Pemira Universitas Mataram tahun 2022 banyak terjadi rekayasa konflik yang sengaja dilakukan oleh oknum dan kelompok tertentu, Kericuhan terjadi pada saat kegiatan Pemira berlangsung, hampir

di setiap fakultas terjadi keributan dan yang paling parah yaitu kejadian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), pada saat dilangsungkannya pemilihan suara, mahasiswa dari FEB merupakan jumlah yang mahasiswanya banyak dibandingkan fakultas lain dan disana terdapat kandidat yang menjadi calon presiden mahasiswa, otomatis banyak oknum yang beranggapan bahwa mahasiswa dari FEB akan memilih kandidat tersebut, sehingga lawan dari kandidat tersebut melakukan keributan di FEB agar suara yang sudah ada dirusak dan mahasiswa tidak melakukan pemilihan. Pada saat itu terjadi pemukulan yang berlanjut dengan keributan, penyebab dari keributan tersebut adanya provokasi yang sengaja dilakukan sehingga merusak berjalannya kegiatan pemilihan. Suara pemilih yang harusnya masuk sekitar 1000 suara di FEB, akan tetapi akibat dari adanya keributan tersebut suara pemilih menjadi hanya sekitar 200 suara.

Selain itu para panitia penyelenggara yang bertugas di FEB juga ikut merasakan sejumlah kejanggaran dan keributan yang terjadi di FEB, sebelum adanya pemukulan yang berakhir dengan

keributan, pihak penyelenggara mendapat banyak gangguan pada pemilihan, seperti adanya pemindahan lokasi awal pemungutan suara secara sepihak, fasilitas yang dibutuhkan tidak ada persiapan, *mic* sengaja dimainkan, dan kemudian berkas yang berisi identitas mahasiswa disensor dan ini yang menyulitkan pihak penyelenggara di FEB kesulitan dalam mengidentifikasi identitas mahasiswa. Penyebab dari adanya konflik dan keributan yang terjadi ini sebenarnya rekayasa konflik atau konflik yang sengaja diciptakan oleh oknum yang sudah mengetahui bahwa pihak mereka kalah dan sengaja melakukan keributan agar suara yang ada dapat dirusak.

#### (4) Panitia Yang Tidak Netral

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa di kepanitiaan KPRM terdapat beberapa mahasiswa yang sengaja dimasukkan menjadi panitia oleh salah satu kelompok pendukung pasangan calon preesiden dan wakil presiden mahasiswa untuk mencuri informasi yang ada dari KPRM. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 2 Rancangan Peraturan Mahasiswa Universitas Mataram Nomor 3 Tahun

2011 tentang Pemilihan Umum Raya, yang berbunyi “Pemira Mahasiswa Unram dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”

Hal ini terbukti ketika ada informasi penting dari panitia KPRM dan harusnya hanya pihak KPRM saja yang mengetahui akan tetapi informasi penting tersebut diketahui beberapa kubu mahasiswa, dan ini yang menjadi kecurigaan antar pihak penyelenggara KPRM. Selain itu pihak penyelenggara juga pernah didorong untuk berpihak ke kelompok tertentu, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Rancangan Peraturan Mahasiswa Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Raya, Artinya disini baik Bawasra maupun KPRM selaku pihak penyelenggara haruslah bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun.

Hasil yang didapatkan beberapa panitia KPRM justru memberikan informasi laporan kepada pihak yang bukan sesama KPRM ataupun Bawasra. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu pihak panitia KPRM yang kala itu ingin mengirim

laporan dokumentasi foto hasil tugas dari pihak KPRM, seharusnya dikirim ke grub yang berisi sesama panita KPRM ataupun Bawasra, akan tetapi laporan tersebut dikirim ke grub yang isinya tidak semua KPRM dan Bawasra ada dan seharusnya jika itu merupakan grub kepanitiaan semua panitia KPRM haruslah ada dalam grub tersebut.

Selain itu salah satu panitia KPRM pernah ditanya oleh panitia KPRM lain apakah dia sudah ikut bergabung pada grub yang isinya ada salah satu kubu paslon dan ini tentunya hal yang tidak dibenarkan. Kejanggalan lain terjadi ketika ada forum dalam panitia KPRM anehnya tidak semua mahasiswa diundang untuk ikut bergabung dalam forum tersebut. Kemudian yang terakhir sering terjadi berulang kali sehingga menimbulkan kecurigaan antar sesama panitia diama pada saat rapat yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon beserta pendukungnya, ada salah satu kubu yang menginginkan system yang mereka bawa harus biisa disetujui dan disahkan oleh KPRM, anehnya pihak KPRM berkali-kali setuju dan mengikuti sistem yang ditawarkan tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan.

Selain KPRM, Bawasra selaku pengawas dari kegiatan Pemira juga terbukti melakukan keberpihakannya terhadap salah satu kubu pasangan calon, hal ini terlihat ketika pada saat adanya kericuhan yang disebabkan alur perhitungan suara yang sudah disepakati justru pihak Bawasra ikut menyalahkan pihak KPRM. Kemudian pada saat malam perhitungan dan pengumuman hasil suara terjadi kericuhan dan para panitia Bawasra justru saat itu dengan beberapa panitia KPRM dan salah satu kelompok dari kubu pasangan calon hilang secara bersamaan pada malam kericuhan terjadi. Selain itu pada saat pengumuman presiden mahasiswa terpilih pihak Bawasra enggan melakukan tanda tangan pada lembar pengesahan presiden mahasiswa terpilih, karena disana dibutuhkan tanda tangan dari ketua KPRM, ketua Bawasra dan juga WR 3, akan tetapi pihak Bawasra sengaja tidak ingin melakukan tanda tangan dan menghilang.

#### **D. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan**

a) Nilai-nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan

berkelompok, kebebasan berpartisipasi, Toleransi, kesetaraan Gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya, kerja sama. Dari nilai-nilai demokrasi yang ada benar-benar harus diaktualisasikan sehingga demokrasi benar-benar nyata berjalan dengan baik, karena nilai-nilai ini menunjang terciptanya demokrasi yang baik.

b) Faktor Pendukung dan Penghambat Diterapkannya Nilai-Nilai Demokrasi Pada Pemilihan Presiden Mahasiswa di Universitas Mataram Tahun 2022

##### **(1) Faktor Pendukung**

Pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 memiliki faktor pendukung dalam diterapkannya nilai demokrasi. Pihak penyelenggara menjadi faktor pendukung dalam diterapkannya nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022. Pihak penyelenggara memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dan memberikan haknya dalam pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022, sehingga mendorong dan mendukung terciptanya nilai-nilai demokrasi.

##### **(2) Faktor Penghambat**

Faktor penghambat diterapkannya nilai demokrasi pada pemilihan presiden mahasiswa di Universitas Mataram tahun 2022 adalah banyaknya masalah yang sengaja diciptakan dan dilatarbelakangi oleh adanya provokasi dan rekayasa konflik yang menimbulkan berbagai keribuan. Permasalahan dan keribuan yang terjadi ini menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap nilai demokrasi. seperti adanya 1) dorongan atau paksaan, 2) pelanggaran terhadap toleransi beragama, 3) rekayasa konflik, dan yang terakhir 4) panitia yang tidak netral,

## **2. Saran**

### **a) Birokrasi**

Birokrasi Universitas Mataram hendaknya selalu mendukung kegiatan Pemira setiap tahunnya dengan mengadakan edukasi atau mengundang pihak terkait untuk memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa terlebih para panitia penyelenggara pemira, terkait dengan kegiatan Pemira. Selain itu, diharapkan bagi pihak birokrasi untuk ikut serta dalam mendorong mahasiswa agar ikut berpartisipasi pada kegiatan Pemira

### **b) Bagi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)**

DPM hendaknya melakukan perekrutan panitia KPRM dan Bawasra secara lebih baik, dengan memberikan syarat berupa mahasiswa yang mendaftar merupakan mahasiswa yang tidak tergabung bagian dari organisasi kampus. Agar panitia yang terpilih tidak akan mendapatkan dorongan untuk memihak dari kelompok atau organisasi manapun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, F. (2021). *Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat ( Bem Ulm ) Berbasis Elektronik*. 08(3), 291–304.
- Agus Firmansyah, Mohamad Mustari, Basariah, E. K. (2023). *Nilai-Nilai Kewarganegaraan Dalam Tradisi Sampo Ayam (Studi Deskriptif Di Desa Tamekan)*. 08(September), 1–23.
- Anggraeni, D., & Suhartinah, S. (2018). Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 14(1), 59–77. <https://doi.org/10.21009/jsq.014.1.05>
- Alwan, M. Z., & Warsono, W. (2021). Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Ketua Umum Himnas Ppkn Pada Kongres Dan Rakernas Di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 218–

232.  
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n1.p218-232>
- Amelia Zahra, K. (2023). *Kebebasan Berpendapat Organisasi Siswa Intra Sekolah ( Osis ) Di Sma Negeri Ngoro*. 235–242.
- Amin, M., Amran, T. S., & Mustari, N. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik Di Pesyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323.
- Aulawi, A., & Srinawati. (2019). *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan Organisasi Untuk Meningkatkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Di Smk Darus Syifa Kota Cilegon*.
- Bakhri, S., Astuti, T. M. P., & Handoyo, E. (2018). Aspek Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2011. *Solidarity: Journal Of Education, Society, And Culture*, 2(2), 112–119.
- Budiarti, A. P. (2017). *Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pemilihan Ketua Osis di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016*.
- Gifari, A., Rispawati, & Yuliatin. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkan Nasionalisme Di Lingkungan Sekolah Islam. *Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(2), 41–53.
- Negara, A. I. S. (2018). *Rancangan Peraturan Mahasiswa Tentang Pemilihan Umum Raya Universitas Mataram*.
- Nugrahaeni, R. (2015). Motivasi Karyawan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suryawati, N. (2018). *Sipendikum 2018*. 116–123.
- Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 37–49.
- Tarigan, P. B. (2021). Implentasi Demokrasi Di Indonesia. *Journal Of Chemical Information And Modeling Nd*, 53(9), 1689–1699.
- Qory Jumrotul Aqobah, Masnur Ali, G. D., & Raharja, A. T. (2020). Penanaman Perilaku Kerjasama Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional. *Untirta*, 5 (2)(2), 134–142.